

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	SUARA PEMBARUAN	6	19-08-2002

Soal Usulan Pajak BBM

Distribusi BBM Akan Sulit Diawasi

JAKARTA - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Departemen Keuangan membahas usulan pemberlakuan pajak tambahan bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi. Jika rencana tersebut direalisasi, diyakini akan menyulitkan pengawasan distribusinya.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Minggu (18/8) mengatakan, usulan penambahan pajak untuk BBM di sektor transportasi atau sektor lainnya, harus dibahas Departemen Keuangan, sebab instansi itulah yang mengurus masalah pajak.

"Saya sendiri belum melihat detail usulan tersebut. Tetapi sikap kami, Departemen Keuangan silakan membahas. Kalau mau diakomodasi, saya mengusulkan agar dikaji lagi dalam suatu tim interdepartemen," kata Purnomo.

Pejabat Sementara Dirjen Migas, Departemen ESDM, Kardaya Warnika, yang dijumpai pada kesempatan yang sama meminta agar usulan tersebut tidak diakomodasi. Pasalnya, akan menyu-

litkan pengawasan dalam pendistribusiannya.

"Seperti kita ketahui, perbedaan harga BBM yang akan sektor-sektor tertentu, selalu memicu penyalahgunaan. Jadi kalau usulan itu diakomodasi, akan menyulitkan kita sebagai pengawas," tambah Kardaya.

Seperti diberitakan *Pembaruan* sebelumnya, Departemen Perhubungan mengusulkan agar pada tahun 2004 BBM yang digunakan untuk transportasi dikenai pajak khusus. Nantinya, pajak tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan transportasi di dalam negeri.

Harga Internasional

Pada kesempatan sama, Purnomo juga menjawab berbagai pertanyaan seputar harga BBM pada 2003. Katanya, karena harga premium yang diberlakukan saat ini sudah sesuai dengan harga internasional, penyesuaian hanya perlu dilakukan pada harga BBM jenis solar dan diesel dan minyak bakar.

"Tapi, seperti yang dikatakan Ibu Presiden, harga

minyak tanah untuk masyarakat belum mencapai harga internasional. Harganya berapa, akan dibahas dengan tim anggaran di DPR dengan mengacu pada besaran subsidi yang akan diberikan untuk sektor itu," kata Purnomo.

Subsidi yang dipersiapkan pemerintah untuk sektor BBM pada 2003 mencapai Rp 13,6 Triliun. Padahal pada tahun 2002, subsidi untuk sektor ini masih mencapai Rp 30,4 triliun.

Selain karena kenaikan harga, pengurangan subsidi BBM juga disebabkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah dari Rp 9.000/dolar AS pada tahun 2002 menjadi Rp 8.700 pada 2003. Selain itu, patokan harga minyak mentah yang ditetapkan pada 2003 hanya US\$ 20,5 per barel. Sebelumnya, pada 2002 harga minyak mentah dipatok US\$ 22 per barel.

Patokan harga minyak mentah yang hanya US\$ 20,5 per barel, dikritik para pengamat migas karena dianggap terlalu konservatif. Kurtubi mengatakan, asumsi ini sangat konservatif dan tidak se-

suai dengan realitas. Pasalnya sampai saat ini, OPEC selalu berupaya menciptakan harga minyak mentah dunia pada kisaran US\$ 22 sampai 28 per barel. Menurutnya, harga yang realistis berkisar US\$ 23 sampai 24 per barel.

Namun Purnomo mengatakan, asumsi ini cukup realistis karena peningkatan harga BBM yang terjadi saat ini tidak didasarkan pada hal-hal yang fundamental. "Harga minyak yang meningkat akhirnya ini lebih banyak disebabkan oleh memanasnya suhu sosial politik di Timur Tengah. Tapi, kita tidak bisa berharap hal itu akan terjadi dalam waktu lama," tambahnya.

Selain itu, asumsi yang konservatif diperlukan agar APBN bisa realistis. "Lebih baik kita mendapat tambahan pemasukan dibanding kurang. Lagi pula, kalau rata-rata harga minyak pada tahun 2003 ternyata lebih tinggi dibanding sebelumnya, akan kita masukkan dalam anggaran Sisa Anggaran Lebih sehingga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan," tambahnya. (K-10)